

---

## INTEGRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN RESPON BENCANA DI INDONESIA

**Aris Sarjito**

Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia

E-mail: arissarjito@gmail.com

---

### ABSTRAK

Indonesia menghadapi bahaya alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, sehingga memerlukan kesiapsiagaan bencana dan tindakan tanggap yang efektif. Namun, kebijakan pertahanan dan koordinasi antar lembaga masih belum dieksplorasi. Penelitian ini mengkaji integrasi kebijakan pertahanan Indonesia antara langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana, dampak koordinasi antar lembaga dan pertahanan sipil, tantangan-tantangan akibat pemisahan kebijakan, dan mengusulkan strategi perbaikan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, menganalisis sumber data sekunder seperti laporan pemerintah, artikel akademis, dokumen kebijakan, dan kerangka kerja serta pedoman internasional mengenai kebijakan pertahanan dan manajemen bencana di Indonesia. Temuan-temuan penelitian ini akan menjelaskan tingkat integrasi yang ada antara kebijakan pertahanan dan langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia. Laporan ini akan mengungkap dampak koordinasi antara lembaga pertahanan dan entitas pertahanan sipil terhadap upaya penanggulangan bencana. Selanjutnya, tantangan-tantangan yang timbul dari pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana akan diidentifikasi. Pada akhirnya, strategi-strategi akan diusulkan untuk meningkatkan integrasi antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia. Penelitian ini akan membahas kebijakan pertahanan Indonesia yang melibatkan kesiapsiagaan bencana dan langkah-langkah tanggap, menekankan koordinasi antara lembaga-lembaga dan pertahanan sipil, mengatasi tantangan pemisahan, dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan integrasi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pertahanan, Kesiapsiagaan Bencana, Tanggap Bencana

### *INTEGRATION OF DEFENSE POLICY AND DISASTER RESPONSE IN INDONESIA*

#### **ABSTRACT**

*Indonesia faces natural hazards like earthquakes, tsunamis, and floods, requiring effective disaster preparedness and response measures. However, defense policies and coordination between agencies remain underexplored. This research examines Indonesia's defense policies' integration of disaster preparedness and response measures, the impact of coordination between agencies and civil defense, challenges due to policy separation, and proposes strategies for improvement. This study will employ a qualitative research approach, analyzing secondary data sources such as government reports, academic articles, policy documents, and international frameworks and guidelines on defense policy and disaster management in Indonesia. The research findings will shed light on the existing level of integration between defense policies and disaster preparedness and response measures in Indonesia. It will reveal the impact of the coordination between defense agencies and civil defense entities on disaster management efforts. Furthermore, the challenges arising from the separation of defense policy and disaster management systems will be identified. Finally, strategies will be proposed to enhance the integration between defense policy and disaster preparedness and response in Indonesia. The research will discuss Indonesia's defense policies involving disaster preparedness and response measures, emphasizing coordination between agencies and civil defense, addressing challenges from separation, and proposing strategies for enhanced integration.*

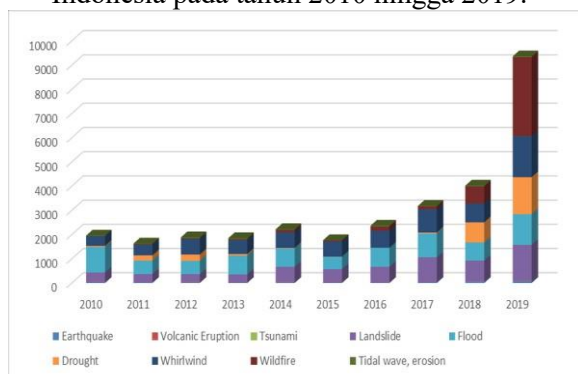
**Keywords:** *Defense Policy, Disaster Preparedness, Disaster Response*

---

## PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang integrasi kebijakan pertahanan dan respon bencana di Indonesia. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, secara geografis rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan kebakaran hutan (Tjandra, 2018). Akibatnya, negara ini telah menyaksikan dampak buruk terhadap kehidupan manusia, infrastruktur, dan kerugian ekonomi. Mengingat kerentanan Indonesia terhadap bencana-bencana ini, menjadi penting untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan signifikansi dan relevansi interaksi ini di Indonesia.

Gambar 1. Jumlah kejadian bencana alam di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2019.



Sumber: (Nikicio, 2020)

Kebijakan pertahanan merupakan aspek penting dalam struktur pemerintahan negara mana pun. Tujuan utamanya berkisar pada menjamin keamanan nasional, melindungi integritas wilayah, dan melindungi warga negaranya dari ancaman eksternal. Kebijakan pertahanan mencakup berbagai dimensi, termasuk pembentukan dan pemeliharaan angkatan bersenjata, perencanaan strategis, modernisasi, dan kerja sama internasional (Angelucci & Isernia, 2020). Dalam konteks Indonesia, kebijakan pertahanan memainkan peran penting dalam manajemen bencana, baik sebagai tindakan pencegahan maupun pada tahap respons dan pemulihan (Cook &

Dorussen, 2021). Relevansi peninjauan keterkaitan kebijakan pertahanan dengan kesiapsiagaan dan respon bencana di Indonesia, sebagai berikut :

1. Mitigasi dan Pencegahan; Dengan mengkaji hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan bencana, Indonesia dapat lebih memahami bagaimana sumber daya, teknologi, dan keahlian pertahanan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memitigasi dan mencegah dampak bencana alam (Sufri et al., 2020a). Pasukan pertahanan memiliki aset dan kemampuan yang penting dalam penilaian risiko, sistem peringatan dini, proses evakuasi, dan perlindungan infrastruktur.
2. Alokasi Sumber Daya; Memahami hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan bencana membantu dalam alokasi sumber daya. Indonesia dapat mengidentifikasi tumpang tindih dan sinergi antara sumber daya pertahanan dan mekanisme tanggap bencana. Melalui koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara sektor pertahanan dan lembaga penanggulangan bencana, negara dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya selama situasi krisis (Newby, 2020).
3. Transfer Pengetahuan; Pasukan pertahanan, dengan struktur disiplin dan keahlian logistiknya, dapat memberikan pengetahuan penting kepada badanbadan manajemen bencana mengenai perencanaan operasi, koordinasi respons, dan manajemen sumber daya. Pembelajaran dari operasi militer terbukti sangat berharga, karena memberikan wawasan holistik mengenai strategi tanggap bencana, khususnya dilingkungan yang penuh tantangan (Latif, 2022).
4. Memperkuat Kerja Sama Internasional; Hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan bencana dapat mendorong kerja sama internasional

dalam bidang pengurangan risiko bencana dan operasi pertolongan. Indonesia, dengan memanfaatkan kebijakan pertahanannya, dapat terlibat dalam kolaborasi bilateral dan multilateral dengan negara lain, berbagi praktik terbaik, pengetahuan, dan sumber daya. Kemitraan tersebut dapat meningkatkan kemampuan tanggap bencana, termasuk penyebaran bantuan kemanusiaan secara cepat dan dukungan khusus selama upaya penyelamatan dan pemulihan (Gong, 2020).

Bencana alam dapat menimbulkan ancaman dan risiko yang besar, menjajaki hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana merupakan hal yang sangat penting. Perlindungan sipil dikaitkan dengan pertahanan sipil di mana yang terakhir terutama digunakan untuk menggambarkan kebijakan untuk melindungi warga sipil (The European Union International Affair, 2021). Dengan menyadari potensi kolaboratif dan tumpang tindih antara sektor pertahanan dan badan-badan penanggulangan bencana, Indonesia dapat mengoptimalkan sumber dayanya, meningkatkan kemampuannya, dan membangun sistem yang kuat untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons. Pendekatan komprehensif ini akan memperkuat keamanan nasional, melindungi kehidupan, dan meminimalkan dampak buruk bencana alam, yang pada akhirnya mengarah pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana, Indonesia berada pada Kawasan Rawan Bencana, karena letaknya pada Kawasan Cincin Api Dunia. (Suprayitno Hitapriya dan Ria Asih Aryani Soemitro, 2019), banyak mengalami bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan banjir. Indonesia Peristiwa-peristiwa bencana ini seringkali menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan konsekuensi

sosioekonomi jangka panjang. Pentingnya kesiapsiagaan dan tanggap bencana tidak dapat dipungkiri lagi, karena hal ini dapat secara signifikan memitigasi potensi dampak dan membantu proses pemulihan. Namun efektivitas upaya penanggulangan bencana bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan pertahanan. Esai ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia.

Meskipun kesiapsiagaan dan tanggap bencana biasanya dikaitkan dengan lembaga-lembaga pertahanan sipil, penting untuk mempertimbangkan peran kebijakan pertahanan dalam upaya-upaya ini. Indonesia, Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana 2005 mendukung promosi global pertama dan signifikan untuk integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah-sekolah. Dalam 15 tahun kemajuan gerakan global dan nasional untuk pendidikan PRB di Indonesia, (2022) sebagai negara dengan keberagaman geografis yang terus menghadapi ancaman alam, harus mengembangkan kebijakan pertahanan komprehensif yang selaras dengan strategi penanggulangan bencana. Masalah muncul ketika kedua domain ini beroperasi secara independen, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam koordinasi, alokasi sumber daya, dan efektivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki bagaimana kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan bencana serta responsnya selaras atau tidak selaras di Indonesia.

Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan, seperti; sejauh mana kebijakan pertahanan di Indonesia memasukkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana? bagaimana dampak koordinasi antara lembaga pertahanan dan lembaga pertahanan sipil terhadap upaya penanggulangan bencana di Indonesia? apa saja tantangan yang dihadapi akibat pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana? strategi apa yang dapat

diadopsi untuk meningkatkan integrasi antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia?

Investigasi ini mempunyai arti penting karena beberapa alasan. Pertama, memahami sejauh mana kebijakan pertahanan mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana dan langkah-langkah respons dapat menjelaskan ketahanan negara secara keseluruhan terhadap bencana alam. Selain itu, peninjauan koordinasi antara badan-badan pertahanan dan lembaga pertahanan sipil memberikan wawasan mengenai potensi kesenjangan atau tumpang tindih dalam tanggung jawab, yang dapat menghambat strategi manajemen bencana yang efektif. Selain itu, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana akan memandu para pembuat kebijakan dalam memitigasi masalah-masalah ini dan meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Terakhir, memberikan saran untuk meningkatkan integrasi antara kebijakan pertahanan dan manajemen bencana dapat memungkinkan tindakan yang lebih holistik dan terkoordinasi untuk melindungi penduduk dan aset Indonesia. Indonesia telah membuat kemajuan yang sangat baik dalam kesiapsiagaan darurat sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional, 2005, termasuk evaluasi eksternal bersama (JEE) kapasitas inti IHR pada tahun 2017. (Rai NK, Rim KI, Wulandari EW, Subrata F Sugihantono A, Sitohang V, 2023)

Memahami hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan serta tanggap bencana sangat penting bagi ketahanan Indonesia terhadap bencana alam (De Maio, 2020). Penelitian ini menyoroti pentingnya menyelidiki hubungan ini dan mengajukan pertanyaan penelitian untuk mengeksplorasi integrasi, koordinasi, tantangan, dan strategi potensial untuk meningkatkan hubungan antara kebijakan pertahanan dan upaya manajemen bencana. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan komprehensif

untuk melindungi masyarakat Indonesia dan meminimalkan dampak bencana alam.

Kerangka teoritis untuk menganalisis pertanyaan penelitian ini dapat dibangun berdasarkan konsep-konsep berikut:

1. Langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana: Hal ini mencakup pengkajian kebijakan, rencana, dan prosedur yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pertahanan di Indonesia untuk mengatasi potensi dampak dan konsekuensi bencana alam atau bencana akibat ulah manusia. Kerangka kerja ini harus mempertimbangkan kerangka kerja seperti siklus manajemen bencana, pendekatan peningkatan kapasitas, metode penilaian risiko, dan sistem komunikasi dalam kebijakan pertahanan (Rai et al., 2020a).
2. Koordinasi antara lembaga pertahanan dan entitas pertahanan sipil: Aspek ini mencakup penyelidikan tingkat kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antara lembaga pertahanan, seperti militer dan pasukan keamanan nasional, dan entitas pertahanan sipil, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi berbasis komunitas. Kerangka kerja ini harus mempertimbangkan konsep-konsep seperti kerja sama antarlembaga, integrasi vertikal dan horizontal, serta efektivitas latihan bersama dan program pelatihan (Oliveira et al., 2023a).
3. Tantangan-tantangan yang terkait dengan pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana: Komponen ini harus mengkaji kesenjangan dan konflik yang timbul karena sifat dan tujuan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana yang berbeda. Kerangka kerja ini harus mempertimbangkan model teoritis fragmentasi birokrasi, hambatan kelembagaan, permasalahan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya,

dan pengaruh faktor politik terhadap integrasi kebijakan (Wu et al., 2021).

4. Strategi untuk meningkatkan integrasi antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan respons bencana: Bagian ini harus mengeksplorasi pendekatan-pendekatan potensial untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana di Indonesia. Kerangka kerja ini harus mempertimbangkan konsep-konsep seperti konvergensi kebijakan, mekanisme kolaborasi antarlembaga, platform berbagi informasi, inisiatif peningkatan kapasitas, dan keterlibatan kelompok pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan mitra internasional (de Moura et al., 2020).

Secara keseluruhan, kerangka teoritis ini harus mengacu pada literatur dan model teoritis yang relevan mengenai manajemen bencana, kebijakan pertahanan, koordinasi antarlembaga, dan integrasi kebijakan untuk memberikan analisis komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam konteks Indonesia. Standar HESE dengan jelas mengartikulasikan pentingnya kesiapsiagaan darurat lokal dalam tata kelola Indonesia yang terdesentralisasi melalui pengembangan rencana kontinjensi dan latihan simulasi untuk bencana alam dan potensi wabah penyakit.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dokumentasi adalah pendekatan penelitian yang serbaguna dan banyak digunakan yang memberikan pemahaman mendalam dan mendalam tentang fenomena kompleks. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini akan membahas penerapan metode penelitian

kualitatif dengan menggunakan data sekunder untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia, mengikuti pedoman yang disarankan oleh Creswell (2014). Indonesia, negara yang rentan terhadap bencana alam, memerlukan kebijakan pertahanan yang kuat dan sistem manajemen bencana yang efisien untuk memitigasi dan merespons secara efektif terhadap kejadiankejadian tersebut. Oleh karena itu, mengkaji hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan serta respons terhadap bencana dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi.

Data sekunder mengacu pada data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan mereka sendiri, menjadikannya pendekatan penelitian yang hemat biaya dan efisien waktu. Data Sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi – studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip – arsip resmi. (Syafrizal Helmi Situmorang, Muslich Lufti, 2014). Untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Indonesia, kami akan menggunakan beberapa sumber data sekunder. Kami akan meninjau dokumen kebijakan, laporan pemerintah, artikel penelitian akademis, dan catatan statistik yang membahas kebijakan pertahanan Indonesia dan dampaknya terhadap kesiapsiagaan dan tanggap bencana.

Analisis data yang digunakan bersifat iteratif dengan menggunakan cara mengumpulkan data, menampilkan data, memadatkan data, dan menampilkan data serta menarik sebuah kesimpulan. (Samiaji Sarosa, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pertahanan di Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan di Asia Tenggara, sangat rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor karena letak geografisnya yang berada di sepanjang cincin api. Peristiwa bencana ini menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan bangsa (Sufri et al., 2020b). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memasukkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana ke dalam kebijakan pertahanannya, dengan menyadari pentingnya mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif. Pembahasan ini mengeksplorasi sejauh mana kebijakan pertahanan di Indonesia telah mengintegrasikan Langkah-langkah untuk kesiapsiagaan dan tanggap bencana.

Indonesia telah melakukan upaya penting untuk mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana ke dalam kebijakan pertahanannya. Negara ini mengakui peran proaktif militer dalam merespons bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berkolaborasi secara luas untuk meningkatkan langkah-langkah kesiapsiagaan. TNI secara aktif berpartisipasi dalam latihan simulasi bencana, menggunakan sumber daya dan personalnya untuk membantu dalam keadaan darurat. Integrasi ini memungkinkan adanya respons yang cepat ketika terjadi bencana, sehingga memaksimalkan perlindungan terhadap kehidupan warga sipil dan infrastruktur (Riyanto et al., 2020).

Lebih jauh lagi, Indonesia menyadari bahwa kesiapsiagaan bencana memerlukan koordinasi dan kerja sama antar berbagai sektor. Negara ini telah menerapkan pendekatan multi-pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, lembaga swadaya

masyarakat (LSM), dan masyarakat lokal. Upaya kolektif ini memastikan mekanisme tanggap bencana yang lebih komprehensif dan efisien (Tanesab, 2020). Hal ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat ketahanannya terhadap bencana alam, dengan memadukan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam strategi pertahanannya.

Indonesia juga memberikan penekanan yang signifikan pada pengintegrasian langkah-langkah tanggap bencana ke dalam kebijakan pertahanannya. TNI memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dan pertolongan segera kepada daerah yang terkena dampak, mendukung proses pemulihan pascabencana. Keterlibatan militer mencakup berbagai kegiatan, seperti dukungan logistik, bantuan medis, evakuasi, dan operasi pencarian dan penyelamatan (Rai et al., 2020b).

Selain peran aktif TNI, Indonesia telah membentuk sistem tanggap bencana khusus. BNPB bertindak sebagai badan koordinator pusat penanggulangan bencana, memastikan respons yang cepat dan komprehensif diseluruh negeri. Pendekatan sistematis ini membantu memitigasi dampak buruk bencana, meminimalkan korban jiwa, dan mempersingkat masa pemulihan. Dengan memasukkan mekanisme tersebut ke dalam kebijakan pertahanannya, Indonesia menunjukkan pendekatan holistik dalam melindungi warga negaranya dan menjaga ketahanan nasional

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan dalam menggabungkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana ke dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Pendanaan yang tidak mencukupi, sumber daya yang terbatas, dan infrastruktur yang ketinggalan jaman sering kali menghambat efektivitas penerapan praktik manajemen bencana.

Selain itu, penyebaran geografis yang luas di ribuan pulau menimbulkan kompleksitas logistik, sehingga respon cepat menjadi

tantangan di daerah terpencil (Trias & Cook, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia harus terus memperkuat kemitraannya dengan pemangku kepentingan regional dan internasional. Peningkatan kerja sama dan pertukaran informasi dengan negara-negara tetangga, khususnya negaranegara yang berada di wilayah lingkaran api Pasifik, akan meningkatkan pertukaran pengetahuan dan meningkatkan kemampuan tanggap bencana. Selain itu, investasi berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur, teknologi, dan program peningkatan kapasitas akan membantu menjembatani kesenjangan yang ada dan memastikan kesiapsiagaan yang lebih baik terhadap bencana di masa depan (Modgil et al., 2020).

## **2. Koordinasi Antara Lembaga Pertahanan Dan Entitas Pertahanan Sipil**

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena rawan terjadinya letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan bencana alam lainnya. Pengelolaan bencana-bencana ini secara efektif memerlukan upaya yang terkoordinasi dengan baik antara badan-badan pertahanan dan lembaga pertahanan sipil. Dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji dampak koordinasi mereka terhadap upaya penanggulangan bencana di Indonesia (Austin, 2020; Oliveira et al., 2023b).

Salah satu dampak signifikan dari koordinasi antara badan-badan pertahanan dan lembaga pertahanan sipil adalah peningkatan dalam pertukaran informasi dan sistem peringatan dini. Badan pertahanan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki teknologi dan keahlian yang canggih untuk mendeteksi, memantau, dan menilai potensi bencana. Dengan berkolaborasi dengan lembaga pertahanan sipil, seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi

berbasis masyarakat, sistem peringatan dini yang komprehensif dapat dibangun. Penyebaran informasi yang tepat waktu ini memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dan segera melakukan evakuasi, sehingga meminimalkan korban jiwa dan kerusakan harta benda (Sitepu et al., 2023).

Koordinasi antara badan-badan pertahanan dan lembaga pertahanan sipil memfasilitasi mobilisasi dan alokasi sumber daya yang efisien selama manajemen bencana. Badan-badan pertahanan, yang dilengkapi dengan personel terlatih dan peralatan khusus, bekerja sama dengan lembaga pertahanan sipil di daerah yang dilanda bencana. Kolaborasi ini memastikan bahwa sumber daya dikerahkan secara optimal dan selaras dengan kebutuhan di lapangan. Badan-badan pertahanan sipil memberikan informasi langsung mengenai kerentanan lokal, kapasitas masyarakat, dan kebutuhan infrastruktur, sehingga memungkinkan badan-badan pertahanan untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Koordinasi ini memastikan respons yang lebih tepat sasaran dan cepat, sehingga mengurangi penderitaan dan mempercepat proses pemulihan (Sulistiawan et al., 2022).

Koordinasi yang efektif antara badan-badan pertahanan dan lembaga pertahanan sipil memainkan peran penting dalam memperkuat keterlibatan dan ketahanan masyarakat. Entitas pertahanan sipil mendukung lembaga-lembaga pertahanan dalam melakukan kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan inisiatif pengembangan kapasitas. Dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana, masyarakat menjadi lebih berpengetahuan tentang potensi risiko, protokol respons, dan prosedur evakuasi (Hutagalung et al., 2020). Koordinasi ini membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan di antara

masyarakat, memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dan mengembangkan ketahanan terhadap bencana di masa depan.

Koordinasi antara lembaga pertahanan dan lembaga pertahanan sipil mengarah pada peningkatan operasi tanggap bencana dan pemulihan di Indonesia. Badan-badan pertahanan mengoordinasikan operasi pencarian dan penyelamatan, prosedur evakuasi, layanan medis, dan pemulihan infrastruktur penting. Pada saat yang sama, lembaga pertahanan sipil, termasuk pemerintah daerah, LSM, dan kelompok sukarelawan, memberikan tambahan tenaga kerja, dukungan logistik, dan bantuan psikologis kepada masyarakat yang terkena dampak. Sinergi antara entitas-entitas ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya tanggap bencana, memastikan transisi yang lebih lancar menuju fase pemulihan dan mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang (Samudro & Kerta Widana, 2022).

### **3. Tantangan Akibat Terpisahnya Kebijakan Pertahanan dan Sistem Penanggulangan Bencana**

Pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana menimbulkan banyak tantangan, baik dalam hal perencanaan strategis maupun respons yang terkoordinasi. Meskipun kebijakan pertahanan biasanya berfokus pada keamanan nasional dan kesiapsiagaan militer, sistem manajemen bencana bertanggung jawab untuk mengelola bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Esai ini akan mengeksplorasi tantangan yang terkait dengan kesenjangan antara kedua sistem ini dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada respons bencana yang efektif (Court et al., 2024).

Salah satu tantangan penting yang timbul dari pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana adalah tidak adanya respons yang terkoordinasi selama keadaan darurat. Karena kebijakan

pertahanan terutama berkisar pada strategi militer dan keamanan nasional, seringkali kebijakan tersebut tidak memiliki kerangka kerja yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat sipil. Kurangnya sinkronisasi antara sistem-sistem ini dapat menunda tanggap darurat, menghambat alokasi sumber daya, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya manajemen krisis (Petrucci et al., 2020).

Kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana yang terpisah seringkali mengakibatkan pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien selama situasi bencana. Lembaga-lembaga pertahanan mempunyai kemampuan logistik yang penting, seperti tenaga kerja, peralatan, dan kendaraan khusus, yang dapat secara signifikan membantu upaya tanggap bencana. Namun, kurangnya integrasi antara kedua sektor ini dapat mengakibatkan kurangnya pemanfaatan atau kesalahan alokasi sumber daya, sehingga menyebabkan penundaan dan ketidakefisienan dalam operasi bantuan bencana (Hersman, 2020).

Respons bencana yang efektif sangat bergantung pada pembagian informasi yang akurat dan real-time. Namun, pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana dapat menghambat kelancaran arus informasi antar entitas. Kurangnya komunikasi ini dapat mengakibatkan keterlambatan atau kesalahan informasi selama situasi kritis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat waktu dan akurat. Pembaruan yang tepat waktu mengenai potensi ancaman, sumber daya yang tersedia, dan wilayah yang terkena dampak sangat penting bagi personel pertahanan dan manajemen bencana (Dubey et al., 2020).

Sistem pertahanan dan manajemen bencana yang terpisah sering kali menyebabkan terfragmentasinya inisiatif pelatihan dan kesiapsiagaan. Personil pertahanan biasanya dilatih untuk mengatasi strategi militer dan ancaman keamanan



nasional, sementara personel manajemen bencana mengkhhususkan diri dalam menangani bahaya alam dan bencana akibat ulah manusia. Kurangnya pelatihan silang dan kolaborasi antar sektorsektor ini membatasi kemampuan mereka untuk merespons secara kolaboratif terhadap keadaan darurat yang kompleks. Mengembangkan program dan latihan pelatihan bersama dapat membantu menjembatani kesenjangan dan meningkatkan tingkat kesiapsiagaan dengan memupuk interoperabilitas dan saling pengertian (Goniewicz & Goniewicz, 2020).

Pemisahan antara kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana juga dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya tanggap darurat. Selama masa krisis, masyarakat mengharapkan respons yang cepat dan terkoordinasi yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Jika kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana dianggap terputus-putus atau tidak kooperatif, hal ini dapat melemahkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kedua sektor tersebut, sehingga menghambat kolaborasi yang efektif dalam kejadian bencana dimasa depan (Christensen & Ma, 2020).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sangatlah penting untuk mendorong integrasi dan koordinasi antara kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana; 1). Pembentukan satuan tugas antarlembaga: Mengembangkan satuan tugas yang terdiri dari personel dari lembaga pertahanan dan manajemen bencana untuk menyusun strategi dan mengoordinasikan upaya selama keadaan darurat (Djalante et al., 2020). 2) Pelatihan dan Latihan Bersama: Melaksanakan program dan latihan bersama yang melibatkan personel pertahanan dan manajemen bencana, membina kerja sama dan pemahaman bersama mengenai respons krisis (Organization, 2020). 3) Platform Berbagi Informasi: Menerapkan jaringan dan platform komunikasi yang kuat untuk memfasilitasi

pertukaran informasi yang tepat waktu dan akurat antara sektor pertahanan dan manajemen bencana (Nespeca et al., 2020). 4) Integrasi Kebijakan: Mendorong para pembuat kebijakan untuk memasukkan pertimbangan manajemen bencana kedalam kebijakan pertahanan, memastikan bahwa potensi ancaman dan kerangka tanggap bencana ditangani secara memadai (Timperio et al., 2020).

#### **4. Meningkatkan Integrasi Antara Kebijakan Pertahanan Dan Kesiapsiagaan Dan Respon Bencana Di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam karena letak geografis dan karakteristik geologinya, antara lain gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan banjir. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan yang kuat yang mengintegrasikan kesiapsiagaan dan tanggap bencana sangat penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan warga negaranya (Sufri et al., 2020a). Penelitian ini akan membahas berbagai strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan integrasi antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan respons bencana di Indonesia.

Salah satu strategi utama untuk meningkatkan integrasi antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana adalah pembentukan mekanisme koordinasi dan kerja sama yang kuat antara badan-badan pemerintah terkait. Hal ini melibatkan kerja sama yang erat antara kekuatan pertahanan, badan penanggulangan bencana nasional, dan departemen terkait lainnya. Latihan bersama secara teratur, pelatihan, dan berbagi informasi dapat meningkatkan kemampuan entitas-entitas ini untuk bekerja sama secara efektif selama keadaan darurat (Islam et al., 2020).

Indonesia harus memprioritaskan investasi dibidang infrastruktur dan teknologi untuk kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Hal ini mencakup pengembangan sistem

peringatan dini, perluasan jaringan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi canggih, seperti citra satelit, drone, dan penginderaan jarak jauh, untuk memantau dan merespons bencana. Memperkuat kapasitas kekuatan pertahanan dalam memanfaatkan alat-alat ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan, mempersiapkan, dan merespons bencana secara efisien (Astuti & Fathun, 2020).

Integrasi inisiatif pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan pertahanan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan dan respons. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan penilaian risiko yang komprehensif dan mengembangkan rencana kontinjensi berdasarkan skenario bencana yang berbeda-beda. Selain itu, fokus pada inisiatif berbasis masyarakat, seperti komite bencana lokal, dapat memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat lokal dalam kesiapsiagaan bencana, sistem peringatan dini, dan rencana evakuasi masyarakat (Amri et al., 2022).

Untuk meningkatkan integrasi, perlu dilakukan investasi dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pasukan pertahanan dan badan-badan manajemen bencana. Program pelatihan khusus dapat membekali personel dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merespons secara efektif selama keadaan darurat. Program-program ini harus mencakup bidang-bidang seperti operasi pencarian dan penyelamatan, bantuan medis, manajemen logistik, dan koordinasi dengan mitra internasional selama tanggap bencana (Pramono et al., 2020).

Mempromosikan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai kesiapsiagaan dan tanggap bencana sangat penting untuk menjamin integrasi kebijakan pertahanan dan keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye publik secara nasional, program pendidikan di

sekolah, dan inisiatif keterlibatan masyarakat (Dollete, 2020). Mendidik warga mengenai risiko bencana, prosedur evakuasi, dan peran pasukan pertahanan akan memfasilitasi pemahaman kolektif dan partisipasi selama kejadian bencana.

## **KESIMPULAN**

Indonesia telah mencapai kemajuan yang patut dipuji dalam memasukkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan tanggap bencana ke dalam kebijakan pertahanannya. Integrasi militer dan keterlibatan lembaga pemerintah dan non-pemerintah telah memperkuat kemampuan negara untuk merespons bencana alam dengan cepat. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan terkait pendanaan, sumber daya, dan infrastruktur. Dengan terus melakukan upaya-upaya ini dan mendorong kerja sama internasional yang lebih besar, Indonesia dapat lebih meningkatkan kebijakan pertahanannya untuk memastikan kesiapsiagaan bencana dan mekanisme respons yang komprehensif, yang pada akhirnya melindungi penduduk dan penghidupan mereka.

Koordinasi antara lembaga pertahanan dan lembaga pertahanan sipil memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini meningkatkan pertukaran informasi, sistem peringatan dini, dan alokasi sumber daya sekaligus memperkuat keterlibatan dan ketahanan masyarakat. Selain itu, hal ini meningkatkan respons bencana dan operasi pemulihan, serta memitigasi dampak bencana terhadap masyarakat lokal. Untuk memaksimalkan manfaat koordinasi ini, diperlukan kolaborasi berkelanjutan, saluran komunikasi yang jelas, dan latihan rutin. Ketika Indonesia menghadapi tantangan bencana yang sedang berlangsung dan di masa depan, koordinasi antara lembaga pertahanan dan lembaga pertahanan sipil tetap penting untuk manajemen bencana yang efektif.

Pemisahan kebijakan pertahanan dan sistem manajemen bencana menimbulkan tantangan besar terhadap respons bencana yang efektif. Untuk memitigasi tantangan-tantangan ini, sangatlah penting untuk menetapkan kerangka kerja kolaboratif, meningkatkan saluran komunikasi, dan mengintegrasikan praktik-praktik manajemen bencana ke dalam pertimbangan kebijakan pertahanan. Hanya melalui upaya-upaya ini kita dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh kesenjangan antara sistem pertahanan dan sistem manajemen bencana, serta melakukan upaya perlindungan yang lebih baik terhadap dampak keadaan darurat.

Integrasi yang efektif antara kebijakan pertahanan dan kesiapsiagaan serta tanggap bencana sangat penting untuk melindungi kehidupan dan harta benda warga negara di negara-negara rawan bencana seperti Indonesia. Dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama, berinvestasi di bidang infrastruktur dan teknologi, berfokus pada inisiatif pengurangan risiko bencana, memprioritaskan pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan dan responsnya. Strategi-strategi ini akan memungkinkan kekuatan pertahanan dan badan-badan penanggulangan bencana untuk bekerja secara terpadu, memaksimalkan sumber daya, dan memitigasi dampak bencana, yang pada akhirnya menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A., Lassa, J. A., Tebe, Y., Hanifa, N. R., Kumar, J., & Sagala, S. (2022). *Pathways to Disaster Risk Reduction Education integration in schools: Insights from SPAB evaluation in Indonesia*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 73, 102860
- Angelucci, D., & Isernia, P. (2020). *Politicization and security policy: Parties, voters and the European Common Security and Defense Policy*. European Union Politics, 21(1), 64–86
- Ardiansyah. Risnita. Jailani. Syahrani. M. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. 2023
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). *Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*. Interstetic: Journal of International Studies, 5(1), 47–68.
- Austin, G. (2020). *National cyber emergencies: The return to civil defence*. Routledge
- Christensen, T., & Ma, L. (2020). *Coordination structures and mechanisms for crisis management in China: Challenges of complexity*. Public Organization Review, 20(1), 19–36.
- Cook, A. D. B., & Dorussen, H. (2021). *Civil protection and disaster management*. In The European Union's Security Relations with Asian Partners (pp. 185–207). Springer
- Court, M. F., Polatty, D. P., & Horne, S. T. (2024). *Civil-Military Coordination in Disaster Response*. In Ciottono's Disaster Medicine (pp. 126–131). Elsevier.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- De Maio, G. (2020). *NATO's response to COVID-19 lessons for resilience and readiness*. Foreign Policy. October, 1–18.
- de Moura, E. H., e Cruz, T. B. R., & Chiroli, D. M. D. G. (2020). *A framework proposal to integrate humanitarian logistics practices, disaster management and disaster mutual assistance: A Brazilian case*. Safety Science, 132, 104965.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D.,

- Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., & Rafliana, I. (2020). *Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091.
- Dollete, L. (2020). *Disaster awareness and preparedness of barrio community in Zambales, Philippines: Creating a baseline for curricular integration and extension program*. *Review of International Geographical Education Online*, 10(2), 92–114.
- Dubey, R., Bryde, D. J., Foropon, C., Graham, G., Giannakis, M., & Mishra, D. B. (2020). *Agility in humanitarian supply chain: An organizational information processing perspective and relational view*. *Annals of Operations Research*, 1–21.
- Gong, L. (2020). *Southeast Asia-China cooperation in disaster management in post-Covid era*.
- Goniewicz, K., & Goniewicz, M. (2020). *Disaster preparedness and professional competence among healthcare providers: Pilot study results*. *Sustainability*, 12(12), 4931.
- Hersman, R. (2020). *Wormhole Escalation in the New Nuclear Age (Summer 2020)*. Texas National Security Review.
- Hutagalung, S., Sulistio, E. B., & Mulyana, N. (2020). *The dynamics of multi actors roles in post-sunda strait tsunami disaster management: Lessons from the infrastructure development phases*. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 737–744.
- Islam, S., Chu, C., & Smart, J. C. R. (2020). *Challenges in integrating disaster risk reduction and climate change adaptation: Exploring the Bangladesh case*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 47, 101540.
- Latif, F. (2022). *Technology transfer as a strategy for disaster risk reduction among the coastal cities of Asia-Pacific: The case of Jakarta*. *The Journal of Community Informatics*, 18(1), 88–103.
- Modgil, S., Singh, R. K., & Foropon, C. (2020). *Quality management in humanitarian operations and disaster relief management: A review and future research directions*. *Annals of Operations Research*, 1–54.
- Nespeca, V., Comes, T., Meesters, K., & Brazier, F. (2020). *Towards coordinated self-organization: An actor-centered framework for the design of disaster management information systems*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51, 101887.
- Newby, V. (2020). *ANZUS cooperation in humanitarian assistance and disaster response in the Asia-Pacific: ships in the night?*. *Australian Journal of International Affairs*, 74(1), 72–88.
- Nikicio, A. N. (2020). *Architecting SatComEnabled Early Warning Systems in Indonesia (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology)*.
- Oliveira, F. N. de, Eckhardt, D., Leiras, A., Gonçalves, P., Brito Junior, I. de, Yoshizaki, H. T. Y., & Pedroso, F. F. (2023a). *Toward the development of a Preparedness and Response Protocol for epidemics and pandemics*. *Production*, 33, e20220034.
- Organization, W. H. (2020). *Multisectoral preparedness coordination framework: best practices, case studies and key elements of advancing multisectoral coordination for health emergency preparedness and health security*.
- Petrucci, S. H. H., Tavana, M., & Abdi, M. (2020). *A comprehensive framework for analyzing challenges in humanitarian supply chain management: A case study of the Iranian Red Crescent Society*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 42, 101340.
- Pramono, J., Kusumastuti, D., Sekarwangi, M., & Choerudin, A. (2020). *The Community Participation in Disaster Mitigation to Managing the Impact of Natural Disasters in Indonesia*. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12, 2396–2403.
- Rai, N. K., Rim, K. I. I., Wulandari, E. W., Subrata, F., Sugihantono, A., &

- Sitohang, V. (2020a). *Strengthening emergency preparedness and response systems: experience from Indonesia*. WHO South-East Asia Journal of Public Health, 9(1), 26–31
- Rai, N. K., Rim, K. I. I., Wulandari, E. W., Subrata, F., Sugihantono, A., & Sitohang, V. (2020b). *Strengthening emergency preparedness and response systems: experience from Indonesia*. WHO South-East Asia Journal of Public Health, 9(1), 26–31
- Riyanto, I. A., Cahyadi, A., Kurniadhini, F., Bachtiar, H., Apriyana, D., & Caraka, B. K. A. (2020). *Understanding forest fire management in indonesia from a global perspective*. ASEAN Journal on Science and Technology for Development, 37(1), 1–6.
- Samudro, E. G., & Kerta Widana, I. (2022). *Humanitarian assistance and disaster relief in the perspective of Indonesia Defense Policy*. Technium Soc. Sci. J., 27, 589.
- Sitepu, A., Harahap, H., Ginting, B., & Halim, A. (2023). *Natural Disaster Management Synergy between Civilians-Indonesian Army (TNI AD) in Karo Regency*. International Journal of Educational Research Excellence (IJERE), 2(1), 10–15.
- Situmorang, Helmi, Fahrizal, Lufti, Muslich. 2014. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis (3)*
- Sufri, S., Dwirahmadi, F., Phung, D., & Rutherford, S. (2020a). *Enhancing community engagement in disaster early warning system in Aceh, Indonesia: opportunities and challenges*. Natural Hazards, 103, 2691–2709.
- Sufri, S., Dwirahmadi, F., Phung, D., & Rutherford, S. (2020b). *Progress in the early warning system in Aceh province, Indonesia since the 2004 earthquaketsunami*. Environmental Hazards, 19(5), 463–487.
- Sulistiawan, J., Syahtaria, I., Siantur, D., Prakoso, L. Y., Juni, H., Saragih, R., & Bangun, E. (2022). *Synergy of TNI and BNPB in Management Earthquake and Tsunami Disaster in Palu Indonesia*. International Journal of Social Science and Human Research, 5(1), 284–288.
- Suprayitno, Hitapriya, and Ria Asih A. Soemitro. 2019. “Pemikiran Awal Tentang Prinsip Tindakan Mitigasi Preventif Resiko Bencana Alam Bagi Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas.” *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 3(1):11–21... 4
- Tanesab, J. P. (2020). *Institutional effectiveness and inclusions: public perceptions on Indonesia’s disaster management authorities*. International Journal of Disaster Management, 3(2), 1–15.
- Timperio, G., Tiwari, S., Lee, C. K., Samvedi, A., & de Souza, R. (2020). *Integrated decision support framework for enhancing disaster preparedness: A pilot application in Indonesia*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 51, 101773.
- Tjandra, K. (2018). *Empat bencana geologi yang Paling Mematikan*. UGM PRESS.
- Trias, A. P. L., & Cook, A. D. B. (2021). *Future directions in disaster governance: Insights from the 2018 Central Sulawesi Earthquake and Tsunami response*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 58, 102180.
- Wu, Q., Han, J., Lei, C., Ding, W., Li, B., & Zhang, L. (2021). *The challenges and countermeasures in emergency management after the establishment of the ministry of emergency management of China: A case study*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 55, 102075.